

Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mensosialisasikan TKA (Tes Kemampuan Akademik) Sebagai Bagian Dari Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional

Malika¹, Rahma Dita Aprilia Putri², Rina Pebriana³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: Rahma Dita Aprilia Putri, e-mail: 23051410236@radenfatah.ac.id, Malika, e-mail:
Rina Pebriana, e-mail: rinapebrianaui@radenfatah.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses sosialisasi kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Disdik Sumsel) dalam konteks reformasi sistem penilaian pendidikan di Indonesia. TKA dirancang untuk mengukur keterampilan fundamental siswa seperti literasi, numerasi, dan bernalar, dengan tujuan memastikan pemerataan mutu pendidikan antarwilayah. Namun, tantangan seperti variasi literasi digital dan pemahaman masyarakat di Sumatera Selatan menunjukkan perlunya sosialisasi efektif. Menggunakan Teori Public Information Model, penelitian ini mengevaluasi efektivitas komunikasi kebijakan berdasarkan indikator penyampaian informasi jelas, akurasi pesan, jangkauan saluran, dan transparansi lembaga. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi dengan informan utama staf bidang kurikulum Disdik Sumsel. Hasil menunjukkan TKA dipahami sebagai program opsional untuk memetakan kemampuan siswa lintas jenjang, dengan sosialisasi menggunakan media Zoom untuk jangkauan luas, mencapai pemahaman sekitar 80% peserta. Kendala utama meliputi gangguan teknologi, diatasi melalui sistem helpdesk berlapis. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk strategi komunikasi yang lebih partisipatif, sesuai karakteristik sosial-budaya Sumatera Selatan, guna meningkatkan penerimaan publik dan efektivitas kebijakan pendidikan.

Kata kunci: Sosialisasi Kebijakan, Tes Kemampuan Akademik, Public Information Model, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Komunikasi Pendidikan.

ABSTRACT

This research examines the policy socialization process of the Academic Ability Test (TKA) by the South Sumatra Provincial Education Office (Disdik Sumsel) within the context of education assessment system reforms in Indonesia. The TKA is designed to measure students' fundamental skills such as literacy, numeracy, and reasoning, with the goal of ensuring equitable education quality across regions. However, challenges such as variations in digital literacy and public understanding in South Sumatra indicate the need for effective socialization. Using the Public Information Model Theory, this study evaluates the effectiveness of policy communication based on indicators of clear information delivery, message accuracy, channel reach, and institutional transparency. A descriptive qualitative approach is applied through in-depth interviews, observation, and documentation analysis with key informants from the curriculum division staff of Disdik Sumsel. The results show that the TKA is understood as an optional program for mapping student abilities across levels, with socialization using Zoom media for broad reach, achieving approximately 80% participant understanding. Major obstacles included technological disruptions, which were addressed through a tiered helpdesk system. This research provides recommendations for more participatory communication strategies, tailored to the socio-cultural characteristics of South Sumatra, to enhance public acceptance and the effectiveness of education policy.

Keywords: Policy Socialization, Academic Ability Test, Public Information Model, South Sumatra Education Office, Education Communication.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perubahan arah kebijakan pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui reformasi sistem penilaian. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang dirancang untuk mengukur keterampilan fundamental peserta didik seperti literasi, numerasi, dan kemampuan bernalar. TKA tidak hanya dipahami sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga sebagai strategi nasional untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan antarwilayah. Sejumlah laporan Kemendikbudristek menekankan bahwa asesmen berbasis kompetensi sangat penting untuk memetakan capaian belajar dan menumbuhkan budaya akademik yang tidak hanya menekankan hafalan (Suyana et al., 2024). Meskipun demikian, perubahan kebijakan ini seringkali menimbulkan tantangan di daerah, terutama terkait kesiapan informasi dan penerimaan publik. Kondisi tersebut juga tampak di Provinsi Sumatera Selatan, di mana variasi literasi digital, akses informasi, dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan baru masih sangat beragam (Hujaimah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan, betapapun baik tujuannya, membutuhkan sosialisasi yang efektif agar dapat dipahami oleh sekolah, guru, siswa, maupun orang tua. Sejalan dengan hal tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan bahwa asesmen berbasis kompetensi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi serta memberikan gambaran capaian belajar peserta didik secara lebih komprehensif dibandingkan penilaian berbasis hafalan (Hunt, 1984).

Dalam konteks Sumatera Selatan, peran Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik Sumsel) sangat krusial sebagai penyampai kebijakan dari pemerintah pusat kepada satuan pendidikan. Saat ini, Sosialisasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) masih dilakukan secara internal melalui platform Zoom yang melibatkan 17 kabupaten/kota, mengignat waktu pelaksanaan yang terbatas. Beberapa satuan pendidikan sudah terbiasa menggunakan aplikasi ANBK untuk pelaksanaan TKA. Namun, untuk wilayah yang belum terbiasa, Disdik Sumsel menerapkan sistem token offline agar sosialisasi tetap dapat dijalankan. Hingga saat ini, belum terdapat dokumentasi publik atau publikasi resmi yang memberikan gambaran lengkap mengenai sosialisasi TKA di Sumatera Selatan. Perbedaan tingkat literasi dan kesetaraan akses internet masih menjado persoalan strategis dalam konteks pendidikan Indonesia, dimana ketimpangan akses antarprovinsi berpotensi memengaruhi pemahaman kebijakan pendidikan berbasis teknologi (Widiasanti et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya startegi komunikasi yang mempertimbangkan media yang sesuai, bentuk pesan yang sederhana, serta pendekatan yang sejalan dengan kondisi masyarakat (Rahmah & Yovani, 2024). Situasi ini membuat strategi komunikasi kebijakan harus mempertimbangkan media yang sesuai. Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan bahwa keberhasilan implementaasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi komunikasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (Tanjung et al., 2025).

Pada penelitian ini, penggunaan Teori Public Information Model menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah atau lembaga publik menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Model ini menekankan bahwa komunikasi pemerintah pada dasarnya bersifat satu arah (*one-way communication*) yang bertujuan memberikan informasi akurat, faktual, dan dapat dipercaya kepada publik. Public Information Model memiliki beberapa indikator utama, yaitu: Penyampaian informasi secara jelas dan faktual, Akurasi pesan tanpa unsur manipulasi, Penggunaan saluran komunikasi yang menjangkau publik luas, dan Transparansi lembaga publik dalam menyampaikan kebijakan.

Merujuk pada teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa proses sosialisasi TKA oleh Disdik Sumsel seharusnya mengikuti prinsip Public Information Model, yaitu memastikan bahwa informasi mengenai tujuan, mekanisme, jadwal, serta implikasi pelaksanaan TKA disampaikan secara terbuka, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Namun kenyataannya, hingga kini belsum ada kajian empiris yang menggambarkan bagaimana Disdik Sumsel menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses komunikasi kebijakan. Hal ini memperkuat urgensi penelitian untuk menilai apakah strategi sosialisasi yang dilakukan sudah memenuhi standar komunikasi publik yang baik sesuai indikator model tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini disusun untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sosialisasi kebijakan TKA berlangsung di Sumatera Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman, persepsi, dan penerimaan publik terhadap kebijakan TKA serta pada evaluasi efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik Sumsel berdasarkan perspektif Public Information Model. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini dirangkai dalam satu alur sebagai berikut: bagaimana pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kebijakan TKA; bagaimana efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik Sumsel; dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan proses sosialisasi tersebut.

Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: memberikan gambaran mengenai pemahaman dan penerimaan publik terhadap kebijakan TKA; mengidentifikasi kendala dan potensi miskomunikasi selama penyampaian kebijakan; mengevaluasi strategi komunikasi yang digunakan dalam proses sosialisasi berdasarkan indikator Public Information Model; serta merumuskan rekomendasi komunikasi kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi komunikasi kebijakan pendidikan serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pola sosialisasi kebijakan agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam proses, strategi, serta dinamika komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali konteks, makna, serta pengalaman para informan terkait pelaksanaan sosialisasi TKA, terutama bagaimana pesan kebijakan disusun, disampaikan, diterima, dan dipahami oleh publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena komunikasi kebijakan secara mendalam, termasuk proses, makna dan pengalaman para pelaku yang terlibat langsung di dalamnya, tanpa memisahkan data dari konteks sosial yang melingkupinya (Lexy J. Moleong, 2017).

Penelitian ini berfokus pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti belum menggunakan data sekunder berupa pemberitaan media secara khusus karena keterbatasan akses terhadap arsip publik yang relevan pada saat penelitian dilakukan. Meskipun demikian, data hasil wawancara dianggap memadai untuk menggambarkan strategi komunikasi yang diterapkan dalam sosialisasi TKA, karena informan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat dan faktual mengenai pelaksanaan tes kepada seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan data primer hasil wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi TKA.



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Jono staff kurikulum dengan pewawancara Malika.

Sumber: Dokumentasi pribadi



Gambar 2. Wawancara bersama bapak Jono staff kurikulum dengan pewawancara Rahma.

Sumber: Dokumentasi pribadi

1. Bentuk Sosialisasi TKA oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi TKA dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Informan menyatakan bahwa satuan pendidikan di wilayah perkotaan telah terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital seperti ANBK, sehingga pelaksanaan TKA secara daring lancar

Untuk wilayah dengan keterbatasan jaringan atau blank spot, pelaksanaan sosialisasi dilakukan menggunakan sistem semi daring atau token offline. Sementara itu, satuan pendidikan di daerah perairan cenderung menerapkan sistem semi online sebagai penyesuaian terhadap kondisi geografis dan infrastruktur teknologi.

Kutipan langsung informan : “Sosialisasi TKA masih dilakukan melalui Zoom karena keterbatasan waktu, dan diikuti oleh 17 kabupaten/kota. Untuk daerah yang mengalami blank spot, pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan token offline, sedangkan daerah perairan banyak menggunakan sistem semi online”

2. Media Komunikasi dalam Sosialisasi TKA

Disdik Sumsel memanfaatkan berbagai media komunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi satuan pendidikan di tiap wilayah. Media daring menjadi sarana utama untuk wilayah yang memiliki akses internet memadai, sementara token offline dan sistem semi online digunakan sebagai strategi adaptif bagi daerah dengan keterbatasan jaringan. Pemilihan media komunikasi ini menunjukkan upaya Disdik Sumsel dalam menyampaikan informasi secara faktual, cepat dan seragam, sesuai prinsip Public Information Model.

3. Penyesuaian Sosialisasi TKA terhadap Kondisi Wilayah

Untuk menghindari analisis dari satu sudut pandang semata, peneliti tidak hanya menelaah pernyataan informan, tetapi juga menganalisis konteks pelaksanaan sosialisasi TKA berdasarkan perbedaan kondisi wilayah, seperti daerah perkotaan, wilayah dengan keterbatasan jaringan (blank spot), serta daerah perairan. Perbedaan konteks tersebut menjadi dasar analisis dalam melihat bagaimana strategi komunikasi disesuaikan dengan karakteristik sasaran kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tetap memperhitungkan multi-perspektif walaupun data hanya diperoleh dari satu informan utama.

4. Hambatan Teknis dalam Sosialisasi TKA

Analisis wawancara menunjukkan adanya kendala teknis yang memengaruhi efektivitas sosialisasi. Keterbatasan jaringan internet menjadi tantangan utama di daerah blank spot dan wilayah perairan. Hambatan teknis seperti keterbatasan internet, perangkat pembelajaran yang kurang memadai, dan disparitas kemampuan digital masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Kesenjangan ini berdampak pada akses informasi dan pemahaman kebijakan pendidikan digital, sehingga perlu dukungan strategi komunikasi dan dukungan teknis yang lebih kuat untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan (Lestari et al., 2025). Selain itu, waktu sosialisasi yang mepet memaksa pelaksanaan dilakukan secara daring dengan persiapan yang singkat. Kendala-kendala ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi di beberapa wilayah, sehingga strategi komunikasi perlu disesuaikan untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan.

5. Analisis Sosialisasi TKA Berdasarkan Public Information Model

Berdasarkan Public Information Model, strategi komunikasi Disdik Sumsel menekankan penyampaian pesan secara akurat dan faktual dari institusi kepada publik. Penggunaan media daring dan token offline menunjukkan upaya lembaga dalam menyampaikan informasi secara cepat dan seragam, meskipun ada keterbatasan teknis di beberapa wilayah. Public Information Model menempatkan lembaga publik sebagai sumber utama informasi yang bertanggung jawab menyampaikan pesan kebijakan secara akurat, objektif, dan transparan kepada masyarakat luas. Model ini menekankan komunikasi satu arah yang bertujuan membangun pemahaman publik terhadap kebijakan tanpa unsur persuasi atau manipulasi informasi (Hunt, 1984).

Menurut peneliti, strategi sosialisasi daring merupakan langkah adaptif yang dilakukan Disdik Sumsel untuk mengatasi keterbatasan waktu dan luasnya wilayah. Namun, ketergantungan pada satu metode komunikasi berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi, khususnya bagi satuan pendidikan di daerah blank spot dan wilayah perairan. Oleh karena itu, strategi komunikasi alternatif, seperti pendampingan luring terbatas atau penguatan koordinasi lokal, diperlukan agar sosialisasi TKA dapat diterima secara merata oleh seluruh satuan pendidikan.

Walaupun demikian, proses sosialisasi tetap menghadapi beberapa kendala. Permasalahan yang paling sering muncul yaitu gangguan aplikasi, perangkat komputer sekolah yang belum memenuhi spesifikasi, serta jaringan internet yang tidak stabil, yang mencerminkan masih adanya kesenjangan digital dalam pendidikan (Zam et al., 2024). Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pendidikan memanfaatkan tiga jalur helpdesk yaitu: Helpdesk Provinsi, berhubungan langsung dengan pusat (Puspendik), Helpdesk Kabupaten/Kota, membantu menyelesaikan kendala di wilayah masing-masing, Helpdesk Satuan Pendidikan, menyelesaikan masalah di tingkat sekolah. Struktur helpdesk berlapis ini merupakan bentuk strategi komunikasi organisasi yang efektif dalam mengatasi hambatan teknologi dan memastikan kelancaran diseminasi informasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya telah berupaya menyampaikan informasi kebijakan secara faktual dan akurat sesuai dengan prinsip Public Information Model. Strategi komunikasi yang diterapkan melalui media daring seperti Zoom Meeting serta penggunaan sistem token offline dan semi online menunjukkan adanya adaptasi lembaga terhadap keterbatasan waktu pelaksanaan dan kondisi geografis wilayah yang beragam. Namun demikian, efektivitas sosialisasi TKA belum sepenuhnya merata diseluruh satuan pendidikan. Perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kendala jaringan internet di wilayah blank spot menjadi faktor utama yang memengaruhi penerimaan dan pemahaman kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang bersifat datu arah, meskipun informatif, masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh sasaran kebijakan secara optimal.

Analisis berdasarkan Public Information Model memperlihatkan bahwa Disdik Sumsel telah memenuhi indikator penyampaian informasi yang jelas, akurat dan bersumber dari lembaga resmi. Namun, keterbatasan variasi saluran komunikasi dan minimnya dokumentasi publik menyebabkan potensi kesenjangan informasi di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi alternatif yang lebih inklusif, seperti pendampingan lutring terbatas, optimalisasi peran koordinator daerah, serta penguatan puublikasi kebijakan melalui media resmi agar informasi dapat diterima secara lebih luas dan merata.

Keberadaan sistem helpdesk berlapis di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan merupakan langkah strategis dalam mengatasi hambatan teknis serta menjaga kelancaran diseminasi informasi kebijakan. Struktur ini mencerminkan upaya organisasi dalam memastikan kesinambungan komunikasi dan dukungan teknis selama pelaksanaan TKA. Dengan demikian, sosialisasi kebijakan TKA di Sumatera Selatan dapat dikatakan telah berjalan secara adaptif, namun masih memerlukan penyempurnaan startegi komunikasi agar sejalan dengan prinsip keterbukaan, jangkauan luas, dan pemerataan informasii sebagaimana ditekankan dalam Public Information Model.

DAFTAR PUSTAKA

- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Fiqri, R., Sasmita, P., Salsabila, N., Mariani, M., Nugraha, D. M., Santoso, G., Indonesia, U. P., & Jakarta, U. M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Faktor , Penyebab , dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. 02(06), 142–148.
- Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations. Holt, Rinehart, and Winston, New York, U.S.A.* <https://search.informit.org/doi/10.3316/aem.vdu627>
- Lestari, C., Pratiwi, R. D., Pratama, D. J., Safitri, S., Studi, P., Sejarah, P., Keguruan, F., Ilmu, D., & Sriwijaya, U. (2025). *Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Pendidikan*. 3.
- Lexy J.Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/9795140515>
- Rahmah, M. A., & Yovani, N. (2024). *Eksklusi Sosial pada Pendidikan Pembelajaran Jarak Jaub Era Digital : Kasus*. 13(1), 1257–1266.
- Suyana, N., Pendidikan, P. K., Global, T., & Pendidikan, S. (2024). *Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas*. 5(1), 620–634.
- Tanjung, A., Darmansah, T., Oktapia, D., & Halawa, S. (2025). *Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran Guru dan Siswa*. 1.
- Widiasanti, I., Rahmadani, S., & Nur, D. A. (2025). *Kesetaraan Akses Internet dan Tantangan Literasi Digital di Indonesia*. 9, 19631–19637.
- Zam, A., Hariro, Z., Harahap, N. R., & Puspitasari, P. (2024). *Mengatasi Kesenjangan Digital dalam Pendidikan : Sosial dan Bets Practices*. 2(4).